Suplemen Taklimat Edisi Bentang Lahan #04

#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Ringkasan

Rencana Pengelolaan Lanskap Bulutana, Kabupaten Bone

Bulutana yang Lestari, Berdaya Saing, dan Inklusif Melalui Penguatan Pertanian Berkelanjutan dan Ekowisata Demi Kesejahteraan Masyarakat





World Agroforestry (ICRAF)

#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Suplemen Taklimat Edisi Bentang Lahan #04

Ringkasan

Rencana Pengelolaan Lanskap Bulutana, Kabupaten Bone

Bulutana yang Lestari, Berdaya Saing, dan Inklusif Melalui Penguatan Pertanian Berkelanjutan dan Ekowisata Demi Kesejahteraan Masyarakat

Tim Penulis
(Kelompok Kerja Bentang Lahan)

A. Yusuf, S.IP., MH (Bappeda), Syamsidar, S.Pi., M.Si (Bappeda), Ir. A. Hendra Setiawan, S.Pt., M.Si, IPM, Sutamin, SP., M.Si (SDABK), Andi Takdir, ST., M.Si (DLH), Akifah Akhsa SP. M. Si (TPHP), Ikhwan Djufri, S.TP., M.Si (Dinas Ketapang), Arham, ST., M.Si (Bappeda), Erniana Andi Hori (BPMDES Bone), Nurkaya (KPH Cenrana), Andi Zulkifly Mallingkaan, S.T, M.Si., Dr. Ade Fariq Ashar, S. STP., M.Si.

Tim Teknis
(ICRAF Indonesia)

Feri Johana, Suyanto, Andree Ekadinata, Sonya Dewi, Ni'matul Khasanah, Ira Ratna Sari, Hikmah Fajar Assiddiq, Seruni Fauzia Lestari, M. Syahrir, Nur Amin Syafri, Erni, Erlangga, Thifali Adzani, Cecilia Yulita Novia, M. Fikri Fadhillah, Sumilia, Hamsir, Endro Prasetio, Junaidi Hutasuhut

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Pijar Riza Anugerah
Riky Mulya Hilmansyah

World Agroforestry (ICRAF)

Sitasi

Yusuf A, Syamsidar, Setiawan HA, Sutamin, Takdir A, Akhsa A, Djufri I, Arham, Hori EA, Nurkaya, Mallingkaan AZ, Ashar AF, Johana F, Suyanto, Ekadinata A, Dewi S, Khasanah N, Sari IR, Assiddiq HF, Lestari SF, Syahrir M, Syafri NA, Erni, Erlangga, Adzani T, Novia CY, Fadhillah MF, Sumilia, Hamsir, Prasetio E, Hutasuhut J, Anugerah PR. 2025. *Suplemen Taklimat Edisi Bentang Lahan #04 – Ringkasan Rencana Pengelolaan Lanskap Bulutana, Kabupaten Bone - Bulutana yang Lestari, Berdaya Saing, dan Inklusif Melalui Penguatan Pertanian Berkelanjutan dan Ekowisata Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

Ketentuan dan Hak Cipta

CIFOR-ICRAF Program Indonesia memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non–komersial dengan tanpa mengubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyakan tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan. Link situs yang CIFOR-ICRAF Program Indonesia sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. CIFOR-ICRAF Program Indonesia menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan CIFOR-ICRAF Program Indonesia, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silakan menambah link ke situs kami www.cifor-icraf.org pada situs anda atau publikasi.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Riky M Hilmansyah

2025

Daftar Isi

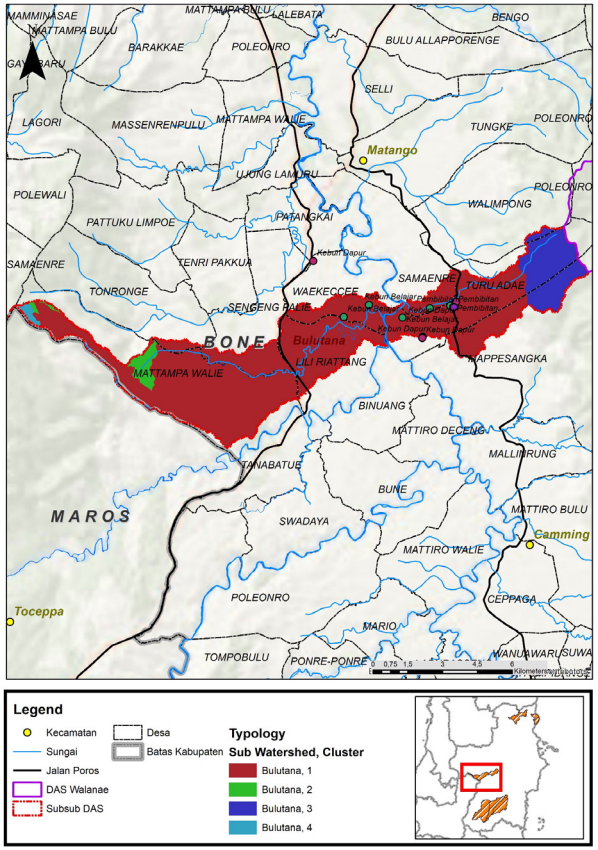
2 Gambaran Umum
3 Isu Strategis Lanskap Bulutana
4 7 Harapan Masyarakat Bulutana di Masa Mendatang
5 Strategi dan Target
6 Peta Intervensi
7 Strategi 1 - Menjaga ketersediaan air terutama pada saat kemarau panjang
8 Strategi 2 - Meminimalisir daerah rawan bencana longsor akibat alih fungsi lahan
10 Strategi 3 - Peningkatan produksi kakao untuk memenuhi standar dan permintaan ekspor
11 Strategi 4 - Optimalisasi produktivitas sawah untuk menghasilkan padi organik
13 Strategi 5 - Optimalisasi potensi wisata alam pinus untuk menarik kunjungan wisatawan
14 Model Bisnis Kakao Agroforestri
17 Profitabilitas Sistem Usaha Tani
18 Kesimpulan



(CIFOR-ICRAF Indonesia)

Gambaran Umum

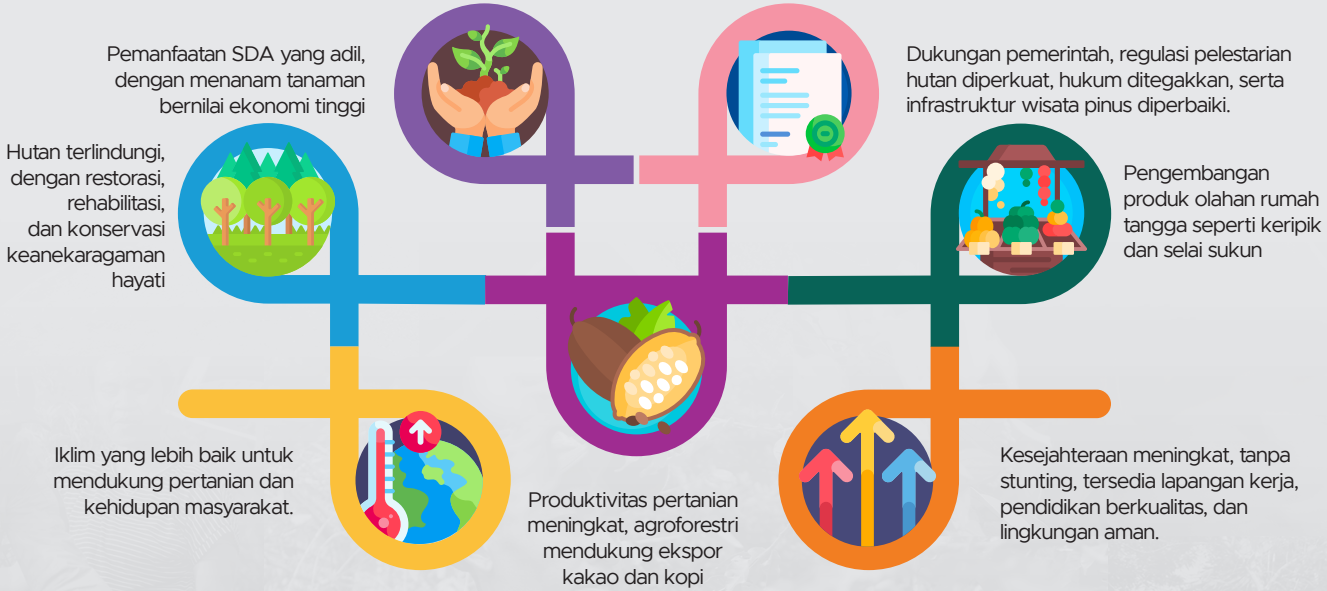
- Landskap Bulutana mencakup wilayah seluas 5.927 hektar yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Lappariaja (60%), Ponre (~30%), dan Bengo (<10%) yang berada di tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila-Walanae.
- Dari total luas wilayah, sekitar 85% merupakan Area Penggunaan Lain (APL), sementara 15% sisanya adalah kawasan hutan.Tutupan hutan di area ini mencapai 54%, yang didominasi oleh hutan produksi, dengan sedikit hutan lindung dan Taman Nasional.
- Dari sisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi permasalahan utama, terutama di kawasan hutan yang memiliki akses terbatas ke jalan utama. Kondisi ini membatasi mobilitas masyarakat serta akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi, yang memperburuk kondisi kesejahteraan penduduk setempat.



Isu Strategis Lanskap Bulutana

- Salah satu tantangan utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, upaya untuk meningkatkan pendapatan sering kali dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ketahanan pangan.
- Alih fungsi lahan jagung yang semakin masif. Banyak petani mengubah lahan-lahan pertanian menjadi ladang jagung monokultur secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan produksi. Hal ini diperparah dengan pola tanam yang tidak teratur dan topografi perbukitan, yang menyebabkan degradasi tanah, penurunan produktivitas lahan, dan meningkatkan risiko erosi serta longsor.
- Pemilihan tanaman yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah semakin memperburuk permasalahan. Tanaman yang ditanam sering kali tidak cocok dengan karakteristik tanah dan iklim Bulutana, sehingga hasil panennya tidak maksimal dan rentan terhadap hama serta penyakit. Hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian dan semakin sulit meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Adanya perkampungan dalam hutan, di mana masyarakat bermukim di daerah yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan konservasi. Kondisi ini tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan risiko konflik dan juga bencana alam seperti longsor dan banjir, yang dapat mengancam keselamatan warga karena da potensi deforestasi.
- Dampak dari ketidakteraturan dalam pengelolaan lahan dan lingkungan ini turut berkontribusi terhadap permasalahan stunting di Bulutana. Ketidakstabilan produksi pangan, kurangnya akses terhadap gizi yang seimbang, serta kondisi lingkungan yang tidak sehat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di wilayah ini.

7 Harapan Masyarakat Bulutana di Masa Mendatang



Strategi dan Target



STRATEGI-1
Menjaga ketersediaan air terutama pada saat kemarau panjang

Tersedianya air pada musim kemarau dengan dibangunnya 4 embung di 4 mata air, 6 embung di 6 desa, dan reboisasi minimal 50 Ha/desa dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi sampai tahun 2030

Konservasi



STRATEGI-2
Meminimalisir daerah rawan bencana longsor akibat alih fungsi lahan

Pengurangan daerah rawan longsor di 2 desa sebanyak 50% atau seluas 100 Ha melalui agroforestry dan Konservasi Tanah dan Air (KTA) pada tahun 2030

Konservasi



STRATEGI-3
Peningkatan produksi kakao untuk memenuhi standar dan permintaan ekspor

Peningkatan kapasitas petani sebanyak 60 kelompok tani mengenai penerapan Praktik Pertanian Baik dan penanganan pasca panen kakao berstandar ekspor pada tahun 2030

Pemanfaatan berkelanjutan



STRATEGI-4
Optimalisasi produktivitas sawah untuk menghasilkan produk padi organik

Peningkatan adopsi pertanian organik sebesar 20% dan peningkatan produktivitas padi organik yang dapat bersaing dengan anorganik (4-6 ton) di 6 desa pada tahun 2030

Pemanfaatan berkelanjutan



STRATEGI-5
Optimalisasi potensi wisata alam pinus untuk menarik kunjungan wisatawan

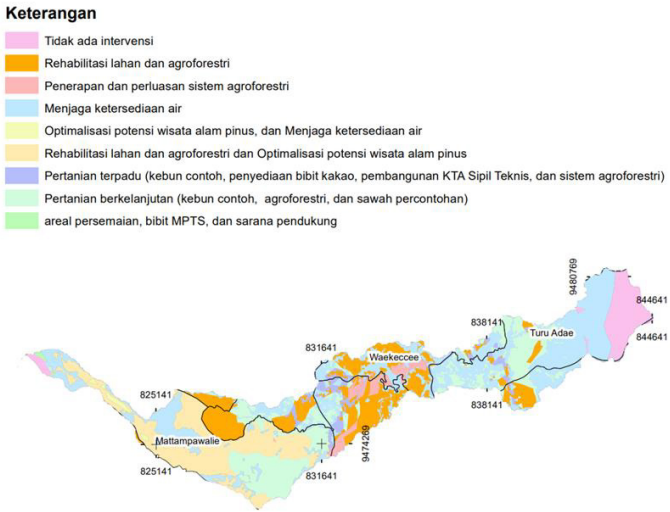
Pengembangan 4 potensi wisata menjadi obyek ekowisata yang mampu menarik kunjungan 5000 orang per tahun pada tahun 2030

Pemanfaatan berkelanjutan

Peta Intervensi

Peta intervensi adalah representasi spasial dari strategi pengelolaan lanskap yang menunjukkan lokasi spesifik di mana intervensi tertentu akan diterapkan. Peta ini disusun berdasarkan unit dan penentuan Lokasi kegiatan intervensi. Dengan menggunakan peta intervensi, keputusan-keputusan pengelolaan yang spesifik dapat dibuat secara lebih akurat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan kondisi kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Kelima strategi Lanskap Bulutana telah dipetakan pada unit perencanaan yang ada. Daerah dengan luasan areal terbesar adalah area untuk strategi menjaga **ketersediaan air**. Strategi ini berada pada areal seluas, 2.007,6 ha atau 33,9% dari total luasan Lanskap Bulutana.





Strategi 1 - Menjaga ketersediaan air terutama pada saat kemarau panjang

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
1.1	Penguatan regulasi dan pengawasan dalam perlindungan hutan, area resapan air, dan sumber mata air.	Jumlah peraturan yang diperkuat dan diterapkan terkait perlindungan hutan dan sumber air	Minimal 6 regulasi tingkat desa diperkuat dan diterapkan dalam 5 tahun.	Bappeda, Pemerintah Desa, Dinas LH, Dinas PSDA
1.1.1	Penguatan regulasi perlindungan area resapan air dan mata air	Frekuensi pengawasan dan jumlah pelanggaran yang teridentifikasi serta ditindaklanjuti	Pelanggaran yang teridentifikasi dan terbukti mendapatkan tindak lanjut.	Bappeda, Pemerintah Desa, DPMD, Dinas LH
1.1.2	Pelatihan dan peningkatan kapasitas personel dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.	Jumlah personel yang mengikuti pelatihan dan menerapkan teknik pengawasan yang diajarkan	Minimal 50 personel mengikuti pelatihan dan 80% dari mereka menerapkan teknik pengawasan dalam 1 tahun.	KPH, Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas LH, DPMD
1.2	Identifikasi lokasi, pengadaan sarana/prasarana, dan area persemaian.	Jumlah lokasi yang telah diidentifikasi dan jumlah sarana/ prasarana yang disediakan	Minimal 6 lokasi diidentifikasi dan 100% sarana/prasarana tersedia dalam 5 tahun.	KPH, KTH, Pemerintah Desa
1.2.1	Pengadaan bibit tanaman Multi-Purpose Tree Species (MPTS) untuk rehabilitasi lahan	Jumlah bibit MPTS yang didistribusikan dan ditanam	Minimal 5000 bibit MPTS didistribusikan dan ditanam setiap tahun.	Pemerintah Desa, KPH, Dinas Pertanian, KTH
1.2.2	Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pembibitan/ persemaian.	Persentase peserta pelatihan yang menerapkan teknik pembibitan yang diajarkan	60% peserta pelatihan menerapkan teknik pembibitan	Pemerintah Desa, KPH, Dinas Pertanian, DPMD, Dinas LH
1.3	Identifikasi lokasi prioritas dan pembangunan bangunan sipil teknis.	Jumlah lokasi prioritas yang telah diidentifikasi dan jumlah bangunan sipil teknis yang telah dibangun	Minimal 6 lokasi prioritas diidentifikasi dan 4 bangunan sipil teknis dibangun dalam 5 tahun.	Pemerintah Desa, KPH, Dinas LH, BMKTCR

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
1.3.1	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan IPAH/PAH serta bangunan KTA.	Jumlah sarana dan prasarana yang telah disediakan serta tingkat keterjangkauan akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut	100% sarana dan prasarana yang direncanakan tersedia dalam 5 tahun dan digunakan oleh masyarakat	Pemerintah Desa, KPH, BMKTCR, Dinas LH
1.3.2	Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait fungsi, manfaat, dan aplikasi upaya KTA.	Persentase peserta pelatihan yang memahami dan menerapkan konsep KTA dalam pengelolaan lingkungan	60% peserta pelatihan memahami dan menerapkan konsep KTA	Pemerintah Desa, KPH, BMKTCR, Dinas LH, DPMD, Dinas PSDA

Strategi 2 - Meminimalisir daerah rawan bencana longsor akibat alih fungsi lahan

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
2.1	Penanaman Pohon dengan Perakaran Kuat dan Cepat Tumbuh/ MPTS	Jumlah pohon yang ditanam dan tingkat keberhasilan tumbuh	Minimal 5000 pohon ditanam per tahun dengan tingkat keberhasilan tumbuh ≥80%.	KPH, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, BPDAS
2.1.1	Pengadaan area persemaian, bibit MPTS, serta sarana dan prasarana untuk pembibitan dan penanaman	Luas area persemaian yang disediakan dan jumlah bibit yang tersedia	Minimal 2 hektar area persemaian tersedia dengan 5000 bibit siap tanam per tahun.	KPH, Dinas Pertanian,, BPDAS
2.1.2	Pelatihan masyarakat serta analisis spesies tanaman prioritas untuk rehabilitas	Jumlah peserta pelatihan dan jumlah spesies prioritas yang dianalisis	100 peserta pelatihan dan minimal 5 spesies prioritas teridentifikasi dalam 1 tahun.	KPH, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
2.1.3	Tinjauan lapangan dan analisis untuk menentukan spesies prioritas serta pemeliharaan tanaman	Adanya laporan analisis spesies prioritas	1 laporan pemeliharaan setiap tahun	KPH, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, BPDAS

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
2.2	Perluasan Aplikasi Sistem Agroforestri	Luasan penambahan area dengan sistem agroforestri	Minimal 50 hektar area diperluas dengan sistem agroforestri dalam 2 tahun.	KPH, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, BPDAS
2.2.1	Pengadaan bibit tanaman bernilai ekonomis serta sarana dan prasarana pendukung persemaian	Jumlah bibit yang mampu diproduksi dan didistribusikan	Minimal 2000 bibit bernilai ekonomis diproduksi dan didistribusikan setiap tahun.	KPH, Dinas Pertanian, BPDAS
2.2.2	Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembibitan/ persemaian.	Jumlah peserta pelatihan yang menerapkan teknik pembibitan/persemaian	60% peserta pelatihan menerapkan teknik pembibitan	KPH, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
2.3	Pembangunan Bangunan KTA Sipil Teknis	Jumlah bangunan KTA yang telah dibangun	Minimal 1 bangunan KTA dibangun dalam 2 tahun.	KPH, Pemerintah Desa, BPDAS
2.3.1	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan KTA	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan digunakan	50% sarana dan prasarana KTA yang direncanakan tersedia dan digunakan dalam 2 tahun.	KPH, BPDAS
2.3.2	Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait fungsi, manfaat, dan aplikasi upaya KTA.	Persentase peserta pelatihan yang memahami dan menerapkan konsep KTA	60% peserta pelatihan memahami dan menerapkan konsep KTA	KPH, BPDAS, Pemerintah Desa
2.4	Pengawasan dan pemantauan keberlanjutan kawasan hutan	Frekuensi pengawasan dan jumlah pelanggaran yang teridentifikasi serta ditindaklanjuti	Pelanggaran yang teridentifikasidan terbukti mendapatkan tindak lanjut.	KPH, BPDAS
2.4.1	Pelatihan personel untuk meningkatkan kapasitas dalam pengawasan	Jumlah sesi pelatihan yang dilaksanakan	Pelaksanaan minimal 4 sesi pelatihan dalam satu tahun.	KPH, BPDAS

Strategi 3 - Peningkatan produksi kakao untuk memenuhi standar dan permintaan ekspor

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
3.1	Peningkatan kapasitas petani dalam budidaya dan pasca panen kakao	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya kakao	75% petani dari 60 kelompok tani mengikuti pelatihan budidaya kakao.	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian
3.1.1	Pelatihan budidaya tanaman kakao	Persentase petani yang menerapkan teknik budidaya yang diajarkan	75% petani yang menerapkan teknik budidaya	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian
3.1.2	Pelatihan penanganan pasca panen kakao	Persentase petani yang menerapkan pelatihan penangangan pasca panen berstandar export dibandingkan dengan total perserta binaan	60 kelompok tani sudah mendapatkan pelatihan pengeolaan pasca panen sesuai standar mutu nasional atau internasional dengan minimal 50% menerapkan pelatihan tersebut.	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian
3.2	Penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana untuk budidaya dan pengelolaan pasca panen kakao	Jumlah peralatan dan fasilitas pengeringan yang tersedia dan berfungsi.	Minimal 3 fasilitas pengeringan terinstilasi dan berfungsi dengan baik	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian. Kelompok Tani
3.2.1	Penyediaan pupuk, pestisida, peralatan, dan lainnya	Jumlah distribusi pupuk dan pestisida yang tepat sasaran.	50% kelompok tani mendapatkan akses pupuk organik dan pestisida ramah lingkungan setiap musim tanam.	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian
3.3	Pendampingan teknis dan manajerial bagi petani kakao	Jumlah kunjungan pendampingan per bulan	Setiap kelompok tani mendapatkan minimal 2 kali pendampingan teknis per tahun	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian
3.3.1	Penyediaan bibit kakao unggul dan bersertifikat	Jumlah bibit unggul berkualitas yang didistribusikan kepada petani.	60 kelompok tani kakao mendapatkan akses bibit unggul berkualitas	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian
3.3.2	Pembuatan kebun contoh	Jumlah kebun contoh yang dibangun dan berfungsi.	Minimal 3 kebun contoh dibangun, tersebar di 3 kecamatan	Pemerintah Desa, Dinas Pertanian

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
3.4	Penguatan rantai nilai dan akses pasar produk kakao	Peningkatan harga jual biji kakao di tingkat petani.	60% petani terhubung langsung dengan pembeli kakao berkualitas ekspor.	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, BUMDes
3.4.1	Fasilitasi kemitraan dengan investor untuk pengembangan usaha kakao	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditandatangani.	Minimal 2 perjanjian kerjasama dengan perusahaan/exportir besar	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, BUMDes
3.4.2	Penguatan mekanisme stabilisasi harga jual kakao	Stabilitas harga kakao selama setahun terakhir.	Berkurangnya jumlah volatilitas penurunan harga yang tidak lebih dari 20% penurunan per tahun	Dinas Pertanian, Kelompok Tani

Strategi 4 - Optimalisasi produktivitas sawah untuk menghasilkan padi organik

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
4.1	Peningkatan kapasitas petani mengenai padi organik	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	60 kelompok tani dalam 5 tahun	Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
4.1.1	Pelatihan budidaya tanaman padi organik	Persentase petani yang menerapkan teknik budidaya organik	50% petani peserta pelatihan menerapkan praktik budidaya organik	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
4.1.2	Pelatihan penanganan pasca panen padi organik	Persentase petani yang menerapkan standar pasca panen	75% petani peserta pelatihan menerapkan teknik pasca panen yang sesuai standar	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
4.2	Sarana Prasarana budidaya dan pengelolaan pasca panen	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	50% kelompok tani memiliki akses ke sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Dinas Pertanian, Pemerintah Desa

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
4.2.1	Penyediaan pupuk, pestisida, peralatan, dan lainnya	Persentase ketersediaan pupuk dan pestisida bagi petani	50% petani memiliki akses terhadap pupuk dan pestisida dengan harga terjangkau	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
4.3	Pendampingan teknis dan manajerial bagi petani padi organik	Frekuensi kegiatan pendampingan per tahun	Minimal 1 kali pendampingan per tahun per kelompok tani	Dinas Pertanian, Pemerintah Desa
4.3.1	Penyediaan bibit unggul padi organik	Jumlah bibit unggul yang disediakan	Minimal 50% kelompok tani mendapatkan bibit berkualitas sesuai kebutuhan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
4.3.2	Pengadaan sawah percontohan	Luas sawah percontohan yang tersedia	0.5 hektar sawah percontohan per desa	Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian
4.4	Penguatan rantai nilai dan akses pasar padi organik	Persentase petani yang mendapatkan akses pasar lebih baik	50% petani memiliki akses pasar dengan harga kompetitif	Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian
4.4.1	Fasilitasi kemitraan dengan investor untuk pengembangan usaha padi organik	Jumlah kelompok tani atau petani yang mendapatkan manfaat dari kemitraan.	Minimal 5 kelompok tani mendapatkan manfaat langsung dari kemitraan.	Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian
4.4.2	Jaminan harga jual yang stabil	Fluktuasi harga jual padi organik	Harga jual padi organik stabil dalam kisaran ±10% dari harga rata-rata tahunan	Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian

Strategi 5 - Optimalisasi potensi wisata alam pinus untuk menarik kunjungan wisatawan

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
5.1	Memperbaiki manajemen pengelolaan ekowisata, keamanan dan kenyamanan pengunjung	Tersedianya sistem manajemen ekowisata yang lebih baik	75% pengelola ekowisata menerapkan sistem manajemen yang ditingkatkan	Koperasi Pengelola, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, BMKTCR, Dinas LH
5.1.1	Edukasi Masyarakat dan Pokdarwis mengenai pengelolaan ekowisata yang baik	Jumlah pelatihan yang dilakukan dan jumlah peserta	Minimal 1 pelatihan per tahun	KPH, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, DPMD
5.1.2	Penyediaan dan perbaikan fasilitas pendukung	Persentase fasilitas yang diperbaiki dan tersedia	75% fasilitas utama diperbaiki atau disediakan dalam 5 tahun	Koperasi Pengelola, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, BMKTCR, Dinas LH
5.1.3	Penyusunan dan implementasi strategi promosi ekowisata berbasis digital dan komunitas	Tersedianya dokumen strategi promosi ekowisata	Dokumen strategi promosi ekowisata selesai dalam 2 tahun	KPH, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, DPMD, Pemerintah Desa
5.2	Menyusun regulasi tata letak area bisnis dan persyaratan membangun bisnis baru	Adanya regulasi yang disusun dan diterapkan	Regulasi disusun dan diterapkan dalam 2 tahun	Koperasi Pengelola, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa
5.2.1	Penataan area bisnis masyarakat agar selaras dengan atraksi utama ekowisata	Jumlah area bisnis yang ditata ulang	75% area bisnis tertata sesuai regulasi dalam 3 tahun	Koperasi Pengelola, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, BMKTCR, Dinas LH

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab
5.3	Pembentukan tim dan rencana kerja rehabilitasi dengan pendanaan berbasis iuran anggota ekowisata	Terbentuknya tim dan rencana kerja rehabilitasi	1 tim dan rencana kerja rehabilitasi tersusun dalam 1 tahun	Koperasi Pengelola, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, KPH
5.3.1	Rehabiltasi hutan pinus secara partisipatif	Luas area hutan pinus yang direhabilitasi	Minimal 20 hektar hutan pinus direhabilitasi dalam 5 tahun	KPH, Dinas LH, BMKTCR
5.3.2	Pemetaan area terdegradasi, penyediaan bibit tanaman, dan penguatan regulasi rehabilitasi	Jumlah bibit yang disediakan dan luas area yang dipetakan	10.000 bibit disediakan dan 100% area terdegradasi dipetakan dalam 5 tahun	KPH, Dinas LH, Dinas Pertanian, Koperasi Pengelola, Pemerintah Desa

Model Bisnis Kakao Agroforestri

Latar belakang

- Sublanskap Bulutana memiliki topografi yang bervariasi, dari dataran tinggi berbukit hingga dataran rendah yang landai.
- Agroforestri kakao berpotensi menjadi solusi pengelolaan bentang lahan berkelanjutan karena kakao dapat tumbuh baik di berbagai jenis topografi yang sesuai dengan kondisi daerah ini.

Permasalahan yang dihadapi

- Fluktuasi harga kakao mendorong petani beralih ke komoditas lain seperti jagung dan padi dengan siklus tanam yang lebih cepat.
- Ketidakpastian kondisi alam yang ditambah dengan kurangnya pengelolaan hama dan penyakit membuat tanaman semakin rentan, meningkatkan risiko gagal panen, dan berdampak pada kestabilan pendapatan petani.
- Produktivitas kakao menurun karena mayoritas tanaman telah berusia tua dan memerlukan peremajaan, sementara akses petani terhadap bibit unggul berkualitas masih terbatas.
- Kurangnya pemahaman dan penerapan praktik *Good Agricultural Practices* (GAP) juga turut menurunkan kualitas biji kakao.

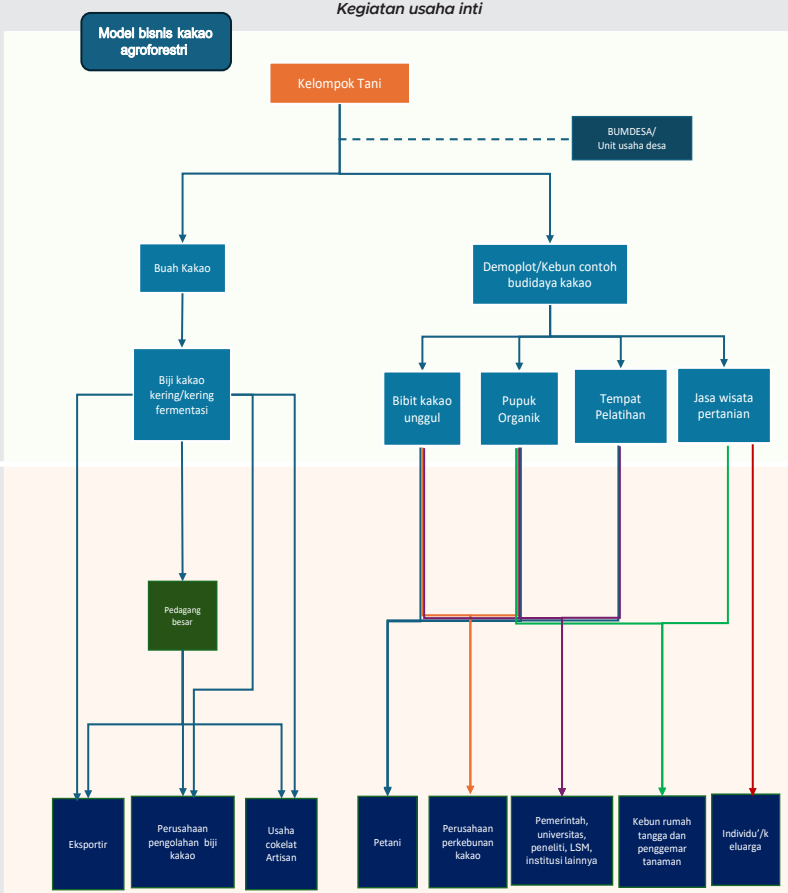
- Harga jual kakao yang rendah di tingkat petani, ditambah dengan ketidakpastian pasar pasca-penutupan operasional PT. Cargill pada tahun 2023, semakin memperbesar tantangan petani kakao.
- Minimnya alternatif pemasaran serta kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas biji kakao menurunkan motivasi petani.
- Terbatasnya program pendampingan budidaya kakao, yang kini hanya dilakukan oleh beberapa institusi seperti YESS, Koltiva, dan DPTPH, juga menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di Sublanskap Bulutana.

Latar belakang

Model bisnis kakao agroforestri mengintegrasikan budidaya kakao sebagai komoditas utama dengan tanaman pendamping seperti kopi, sukun, aren, dan kelapa untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi petani. Keberhasilan model kakao agorofrestri ini bergantung pada faktor pemungkin dan fungsi pendukung yang memastikan kelangsungan produksi dan pemasaran kakao.

Tujuan intervensi

- Agroforestri kakao di Sublanskap Bulutana berpotensi besar dalam meminimalisir risiko bencana longsor serta menjaga kelestarian tanah dan air. Akar yang kuat dan daun lebat kakao efektif mencegah erosi, menjaga kelembapan tanah, serta meningkatkan penyerapan air hujan.
- Budidaya kakao juga menjadi solusi pemulihan lahan kritis dan mendorong keberagaman hayati. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Climate-Smart Agriculture* (CSA) dapat meningkatkan produktivitas kakao berkualitas premium.
- Perbaikan penanganan pasca-panen dan efisiensi rantai nilai produk kakao memperluas jangkauan pasar dan distribusi keuntungan yang merata. Akses setara bagi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam memperkuat peran mereka sebagai petani dan mengurangi ketimpangan gender.
- Diversifikasi sumber pendapatan melalui usaha berbasis kakao dan tanaman pendamping juga meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

Faktor Pemungkin	*Kegiatan usaha inti*	*Fungsi pendukung*	*Institusi pendukung*
Proses produksi • Panduan Sistem Pertanian yang Baik (GAP) dan Pertanian • Cerdas Iklim (CSA) • Aturan pembukaan lahan tanpa bakar • SNI Standardisasi Teknik Budidaya dan penanganan pasca panen Kakao • SNI Standar Mutu Biji Kakao • Peraturan dan Program Pemerintah • Perdes tentang agroforestri • Prinsip kesetaraan gender • Izin usaha		• Input perkebunan, seperti bibit unggul,sarana dan prasarana • Pengetahuan dan sumber informasi teknik budidaya, penanganan paska panen • Tenaga penyuluh pertanian • Penguatan kapasitas: pelatihan, pendampingan • Teknologi tepat guna yang terjangkau • Infrastruktur pendukung • Sumber pembiayaan	• Kelompok tani • BUMDESA &/unit usaha desa lainnya • Pemerintah di tingkat desa • Bappelitbangda • Pokja Kab. Bone • DPMD • BPBD • DP3A • Dinas TPHP • Dinas Pariwisata • DPMPTSP • Dinas Koperasi dan UKM • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas PU Pera • Askindo • Lembaga sertifikasi • Lembaga pembiayaan • NGOs, Lembaga riset, universitas
Pemasaran • Sertifikasi organik • Sertifikasi produk keberlanjutan • Sertifikasi benih/ bibit • Izin edar pupuk dan benih/bibit • SNI pengolahan biji kakao kering/kering fermentasi • Peraturan merek dan pengemasan • Label halal dan P-IRT • Regulasi pajak • Program kredit usaha mikro • Regulasi ekspor impor • Peraturan perdagangan biji kakao kering/kering fermentasi		• Penguatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan) pengelolaan bisnis, pemasaran • Gudang • Pengemasan • Teknologi informasi • Saluran distribusi • Informasi harga & akses pasar • Sumber pembiayaan	• Pokja Kab. Bone • Dinas Perindustrian dan perdagangan • Dinas TPHP • Dinas Pariwisata • DP3A • Dinas Koperasi dan UKM • BPJPH • Dinas kesehatan • Lembaga sertifikasi produk dan perdagangan • Lembaga Sertifikasi Nasional Terakreditasi (LSN) • Kantor pelayanan pajak • NGOs, lembaga riset, universitas • Dinas Kesehatan • Lembaga pembiayaan • Sektor swasta • KADIN • APINDO

Profitabilitas Sistem Usaha Tani

Indikator Ekonomi	Kakao Mono (Praktik Tradisional) 25 Tahun	Kakao-AF Pohon Buah (GAP) 25 tahun	Kakao-Kopi (GAP) 25 tahun
Net Present Value (Rp/Ha)	73,380,218	85,918,300	75,386,532
Equivalent Annual Earnings (Rp/Ha/Thn)	6,410,659	8,219,922	6,585,935
Interest Rate of Return	25%	20%	15%
Return to Labour (Rp/HOK)	190,48	189,867	215,591
Gross Benefit Cost Ratio	1.40	1.33	1.29
Payback Period (tahun)	10.3	9.6	11.7
% Perubahan *Net Present Value*		17%	3%
Biaya Investasi (Rp/Ha)	24,925,500	49,319,400	52,701,906
% Perningkatan Biaya investasi		98%	98%
Total Kebutuhan Tenaga Kerja (Hari Orang Kerja)	2,763	3,726	3,052

Simulasi ini menggunakan hasil panen berupa biji kakao kering non fermentasi (praktik BAU/Tradisional, Rp40.000/kg) dan fermentasi (praktik GAP, Rp60.000/kg) yang dijual petani. Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan kebun kakao dapat meningkatkan keuntungan usaha tani hingga 17%. Namun, transisi dari kakao monokultur ke sistem agroforestri memerlukan investasi awal yang lebih besar. Meskipun sistem kakao-kopi tidak sebesar agroforestri dengan buah, namun menunjukkan manfaat terhadap tenaga kerja (*return to labor*) yang lebih besar. Secara umum, budidaya agroforestri membutuhkan tenaga kerja lebih tinggi karena melibatkan kegiatan yang lebih kompleks dan multijenis, tetapi berkontribusi pada keberlanjutan dan diversifikasi pendapatan petani.

Kesimpulan

Rencana Pengelolaan Lanskap Bulutana bertujuan mewujudkan lanskap yang lestari, berdaya saing, dan inklusif melalui penguatan pertanian berkelanjutan dan ekowisata demi kesejahteraan masyarakat. Rencana ini mengarahkan alokasi ruang sesuai visi bersama, termasuk peremajaan kakao untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan volume dan nilai ekspor kakao dan kopi, intensifikasi agroforestri untuk menjaga ekosistem, diversifikasi pendapatan masyarakat, adopsi teknologi ramah lingkungan, peningkatan jumlah wisatawan, serta penguatan peran perempuan dalam usaha produktif dan pengambilan keputusan komunitas.

Penyusunan rencana ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan desa di tiga kecamatan Lanskap Bulutana, KPH, serta dinas terkait KPH, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, BPDas, Dinas PSDA, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, DMPMD, Dinas BMCKTR, dan Bappeda Bone. Proses ini menghasilkan lima strategi utama: 1 Menjaga ketersediaan air terutama pada saat kemarau panjang, 2 Meminimalisir daerah rawan bencana longsor akibat alih fungsi lahan, 3 Peningkatan produksi kakao untuk memenuhi standar dan permintaan ekspor, 4 Optimalisasi produktivitas sawah untuk menghasilkan produk padi organik, 5 Optimalisasi potensi wisata alam pinus untuk menarik kunjungan wisatawan.

Setiap strategi dilengkapi indikator, target, dan pihak penanggung jawab untuk memastikan pemantauan dan evaluasi yang partisipatif. Sebagai contoh, peningkatan produksi kakao ditargetkan melalui pelatihan 60 kelompok tani dalam praktik pertanian berkelanjutan dan penanganan pascapanen standar ekspor pada 2030. Lanskap Bulutana juga memiliki potensi besar dalam pengembangan agroforestri kakao, didukung oleh model bisnis berbasis diversifikasi produk kakao.

Keberhasilan rencana ini bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta, serta integrasi dengan kebijakan yang lebih luas seperti RPHJP, RPJMD, dan rencana sektoral lainnya. Kolaborasi antarpemangku kepentingan juga krusial dalam meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif guna memastikan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

In partnership with Canada

#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia